

Pengaruh Kaderisasi dan Komunikasi terhadap Partisipasi Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bekasi

Subagio S.Waluyo
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Krisnadwipayana
subagio0358@gmail.com

Submitted: 22/04/2022; Revised: 17/05/2022; Published: 22/06/2022

Abstract

This research aims to know whether there is effect or not: 1) forming cadres to the political participation; 2) communication to the political participation; and 3) forming cadres and communication to the political participation.

Populations of this research are PKS' cadres (in this case core cadres) in Kota Bekasi numbering to \pm 700 persons. Due to the population are homogeneous, the sample is taken by simple random sampling. Determination of total samples in this research is at the level of error 10%, which should be numbering to 195 persons, and it is finally rounded up to 200 persons. Dependent variable of this research is political participation. While independent variable is forming cadres and communication. Dependent and independent variable data are collected by using questioner. Data of the research result are analyzed by using analysis technique 1) simple correlation; 2) double correlation; 3) partial correlation; 4) simple linear regression; and 5) double linear regression. Level of significant is $\alpha = 0.01$.

The result of research shows that first, there is positive and significant effect of forming cadres to the political participation numbering to 97.08%. It means, the better implementation of forming cadres is also better for the political participation of PKS' cadres in Kota Bekasi. Second, there is positive and significant effect of communication to the political participation numbering to 96.73%. It means, more effective and efficient communication makes better political participation of PKS' cadres in Kota Bekasi. Third, there is positive and significant effect of forming cadres and communication jointly to the political participation numbering to 97.59%. It means, better implementation of forming cadres followed by efficient and effective communication, it is also becoming better political participation of PKS' cadre in Kota Bekasi.

Keywords: *Forming Cadres, Communication, Political Participation*

Pendahuluan.

Pemilihan Umum (pemilu) 2004 baru saja berakhir. Pemilu yang semula diragukan bisa diselenggarakan atau tidak, ternyata di luar dugaan bisa berjalan lancar. Bahkan, bisa dikatakan selama kampanye relatif aman-aman saja. Hal itu bisa dibuktikan tidak ada lagi rasa ketakutan atau kecemasan di kalangan masyarakat ketika menghadapi ribuan massa yang berkampanye. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu, kampanye saat ini termasuk yang paling tertib. Pemilu itu sendiri pun berjalan lancar dan tertib.

Meskipun di sana-sini banyak terjadi penyimpangan, para cendekiawan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor menilai bahwa pemilu 2004 dinilai sukses (*Kompas*, 13 April 2004).

Pemilu yang dinilai sukses oleh Forum Rektor ini, meskipun semula diperkirakan tidak akan berjalan lancar sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan Perppu No.2/2004 sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pemilu susulan dan lanjutan, ternyata hasilnya di luar dugaan, yaitu munculnya pemain-pemain baru yang semula tidak diperhitungkan kekuatannya. Pemain-pemain baru yang semula tidak diperhitungkan kekuatannya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PKS diprediksikan hanya akan memperoleh 2.3% suara. Prediksi tersebut ternyata sama sekali tidak tepat karena ternyata memperoleh suara 7.34% atau 8.325.020 dan memperoleh kursi 8.18% atau 45 kursi. Kalau hasil prediksi yang hanya 2.3%, PKS tentu saja tidak akan selamat *Electoral Threshold (ET)*. Ternyata, hasil perolehan PKS jauh melampaui *ET*. Partai-partai besar yang semula menurut prediksi LSI seperti PDIP turun hanya 8.1%, ternyata turun sampai dengan hampir 15%. Sebaliknya, Golkar yang akan memperoleh lonjakan kenaikan sampai dengan hampir 8%, ternyata turun hampir 1%. Bagaimana pula dengan partai-partai besar lainnya seperti PPP, PKB, dan PAN? Hasil perolehan suara Pemilu 2004 ternyata jauh dari prediksi perolehan LSI. Dari tujuh partai peserta Pemilu 1999 yang mengalami kenaikan signifikan pada Pemilu 2004 hanya PKS.

Bagaimana dengan hasil perolehan suara PKS di tingkat provinsi yang dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Hasil perolehan PKS, baik perolehan suara maupun kursi juga mengalami kenaikan. Jika pada Pemilu 1999, PKS yang pada waktu itu masih menggunakan nama PK memperoleh 537.897 suara (2 kursi) menjadi 2.369.231 (14 kursi) atau mengalami kenaikan 650%. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa pada Pemilu 1999 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada Pemilu 2004 kota-kota dan kabupaten-kabupaten di atas tidak lagi masuk Provinsi Jawa Barat sehingga dari perolehan baik suara maupun kursi kenaikan PKS di Jawa Barat boleh jadi mencapai 700%. Suatu kenaikan yang luar biasa tentunya.

Kenaikan perolehan suara dan kursi PKS tentu saja disebabkan oleh perolehan suara dan kursi yang juga mengalami kenaikan di tingkat kota/kabupaten. Kota Bekasi,

misalnya, yang dijadikan objek dalam penelitian ini mengalami kenaikan perolehan suara dan kursi PKS yang juga signifikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 :Hasil Perolehan Suara Dan Kursi Pemilu 2004 di Tingkat II Kota Bekasi

No.	Nama Partai	Hasil Perolehan		
		Suara	%	Kursi
1	PKS	209.610	21.71	11
2	PG	167.759	17.38	9
3	PD	147.024	15.23	7
4	PDIP	120.610	12.49	6
5	PAN	87.279	9.04	6
6	PPP	58.421	6.05	4
7	PDS	49.624	5.14	1
8	PBB	20.462	2.12	1
9	PKB	31.399	3.25	0
10	PBR	18.276	1.89	0
11	PKPB	17.707	1.83	0
12	PP	5.403	0.56	0
13	PKPI	4.333	0.45	0
14	PM	4.221	0.44	0
15	PBSD	3.733	0.39	0
16	P2P	3.299	0.34	0
17	PPNUI	2.922	0.30	0
18	PNBK	2.506	0.26	0
19	PPDK	2.470	0.26	0
20	PSI	2.374	0.25	0
21	PNI-M	2.129	0.22	0
22	PPDI	1.679	0.17	0
23	PPIB	1.659	0.17	0
24	PPD	554	0.06	0
J U M L A H		965.456	100	45

Sumber: KPUD Kota Bekasi 2004.

Bandingkan dengan hasil perolehan suara dan kursi PK di Pemilu 1999 yang hanya memperoleh 42.468 suara (5.2%) atau 2 kursi dengan hasil perolehan suara pada Pemilu

2004 yang memperoleh suara 209.610 (21.71%) atau 11 kursi. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah mengapa terjadi kenaikan yang signifikan pada perolehan baik suara maupun kursi PKS di Pemilu 2004 ini? Terjadinya kenaikan perolehan baik suara maupun kursi PKS di Pemilu 2004 lebih disebabkan oleh tiga hal yang saling berpengaruh, yaitu kaderisasi, komunikasi, dan partisipasi politik. Ketiga hal itu yang akan diteliti oleh penulis.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifat dan jenis penelitian yang tercantum di atas, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif eksplanatif dengan kausalitas dan korelatif. Dikatakan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan pengaruh kaderisasi dan komunikasi serta partisipasi politik saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab atau faktor-faktor yang terkait dengan obyek penelitian tersebut. Di sisi lain, dikatakan eksplanatif karena memberikan arti untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian, yaitu kaderisasi dan komunikasi di satu sisi dengan partisipasi politik. Pendekatan kausalitas dan korelatif memberikan arti bahwa penelitian ini dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel penelitian yang berbeda, yaitu variabel bebas (kaderisasi dan komunikasi administrasi) dengan variabel terikat (partisipasi politik). Pendekatan ini bukan sekedar untuk memberikan deskripsi tetapi juga mencakup pengujian dan penaksiran hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan demikian, akan dapat diketahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat serta besarnya arah hubungan yang terjadi.

Pemilihan metode seperti terurai di atas ditujukan pada variabel yang dikorelasikan. Berarti hakikat makna penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut rumusan pokok permasalahan. Agar penelitian ini dapat mewujudkan maksud dan tujuan penelitian serta manfaatnya, metode penelitian yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam rangka mengimplementasikan metode penelitian, peneliti terlebih dahulu akan berpedoman pada subvariabel dan indikator terpilih dari masing-masing variabel penelitian.

Pembahasan

Sebagai salah satu syarat analisis data dilakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu. Alat yang digunakan dalam Pengujian normalitas data melalui uji statistik nonparametriki, yaitu uji Lilliefors. Pengujian dilakukan terhadap setiap variabel

penelitian. Berikut ini ditampilkan tabel yang berisikan rangkuman hasil pengujian terhadap tiga variabel tersebut.

Tabel 2: Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	n	L_{hitung}	$L_{tabel} (0.20)$	Kesimpulan
X_1	200	0.0692	0.227	Normal
X_2	200	0.0755	0.227	Normal
Y	200	0.1246	0.239	Normal

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai L_{hitung} ketiga variabel penelitian lebih kecil dari nilai L_{tabel} pada tingkat kepercayaan 0.20. Hal ini menunjukkan bahwa sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Dari perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil untuk hubungan (X_1) dengan (Y), yaitu sebesar 0.9853 dengan koefisien determinasi 0.9708 yang berarti 97.08% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui kaderisasi. Dari uji kebermaknaan koefisien korelasi diperoleh $t_{hitung} = 81.1255 > t_{tabel} (\alpha=0.01) (dk=198) = 2.33$. Hal ini menunjukkan pengaruh kaderisasi (X_1) terhadap partisipasi politik (Y) bersifat positif dan sangat berarti. Korelasi antara kedua variabel ini tetap positif dan sangat berarti walaupun uji korelasi parsial diperoleh $r_{YX_1} = 0.4520$, $t_{hitung} = 7.1122 > t_{tabel} (\alpha=0.01) (dk=197) = 2.33$. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang berbunyi "Diduga ada pengaruh kaderisasi yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik kader PKS di Kota Bekasi" dapat diterima.

Pengujian regresi linear sederhana Y atas X_1 diperoleh persamaan regresi: $\hat{Y} = 130.4525 + 0.2593X_1$. Sementara itu dari uji kebermaknaan regresi diperoleh $F_{hitung} = 16.7860 > F_{tabel} (\alpha=0.01) (dk=198) = 6.76$. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa kaderisasi merupakan salah satu faktor penentu partisipasi politik kader PKS di Kota Bekasi.

Dari perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil untuk hubungan (X_2) dengan (Y), yaitu sebesar 0.9835 dengan koefisien determinasi 0.9708 yang berarti 96.73% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui komunikasi. Dari uji kebermaknaan koefisien korelasi diperoleh $t_{hitung} = 76.5431 > t_{tabel} (\alpha = 0.01) (dk=198) = 2.33$. Hal ini menunjukkan pengaruh komunikasi (X_2) terhadap partisipasi politik (Y)

bersifat positif dan sangat berarti. Korelasi antara kedua variabel ini tetap positif dan sangat berarti walaupun uji korelasi parsial diperoleh $r_{YX_2} = 0.4520$, $t_{hitung} = 7.1122 > t_{tabel} = (\alpha = 0.01) (dk=197) = 2.33$. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang berbunyi “Diduga ada pengaruh komunikasi yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik kader PKS di Kota Bekasi” dapat diterima.

Pengujian regresi linear sederhana Y atas X_2 diperoleh persamaan regresi: $\hat{Y} = 144.2134 + 0.0894X_2$. Sementara itu dari uji kebermaknaan regresi diperoleh $F_{hitung} = 4.8716 > F_{tabel} = (\alpha = 0.05) (dk=198) = 3.89$. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa komunikasi menjadi faktor penentu partisipasi politik kader PKS di Kota Bekasi.

Dari perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil untuk hubungan (X_1) dan (X_2) dengan (Y), yaitu sebesar 0.9879 dengan koefisien determinasi 0.9759 yang berarti 97.59% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui kaderisasi dan komunikasi. Dari uji kebermaknaan koefisien korelasi diperoleh $F_{hitung} = 89.5679 > F_{tabel} (\alpha = 0.01) (dk=198) = 2.33$ (Lampiran 5). Hal ini menunjukkan pengaruh kaderisasi (X_1) dan komunikasi (X_2) terhadap partisipasi politik (Y) bersifat positif dan sangat berarti. Korelasi antara ketiga variabel ini tetap positif dan sangat berarti walaupun uji korelasi parsial diperoleh $r_{YX_1X_2} = 0.4520$; $t_{hitung} = 7.1122 > t_{tabel} = 2.33 (\alpha = 0.01) (dk = 3/197) = 2.33$. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang berbunyi “Diduga ada pengaruh kaderisasi dan komunikasi yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik kader PKS di Kota Bekasi” dapat diterima.

Pengujian regresi linear berganda Y atas X_1 dan X_2 diperoleh persamaan regresi: $\hat{Y} = 126.747 + 0.2411X_1 + 0.02730X_2$. Sementara itu dari uji kebermaknaan regresi diperoleh $F_{hitung} = 7.7728 > F_{tabel} (\alpha = 0.01) (dk = 198) = 6.76$. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa kaderisasi dan komunikasi secara bersama-sama merupakan salah satu faktor penentu partisipasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan baik dari rumusan pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, maupun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti. Artinya, hasil uji hipotesis penelitian dengan menggunakan korelasi sederhana menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan demikian, variabel kaderisasi (X_1) dan komunikasi (X_2) berpengaruh positif dan sangat bermakna terhadap partisipasi politik (Y). Kepositifan dan kesignifikanan di antara ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan pada uraian berikut ini.

Pertama, pengujian regresi sederhana untuk variabel kaderisasi (X_1) dengan partisipasi politik (Y) memperoleh hasil: $\hat{Y} = 130.4525 + 0.2593 X_1$ dengan koefisien korelasi 0.9853. Hasil tersebut didukung oleh tingkat kepercayaan yang kemungkinan memunculkan kekeliruan dalam pendugaan yang relatif kecil, yaitu 1% ($\alpha = 0.01$). Oleh karena itu, kaderisasi dapat memprediksi timbulnya partisipasi politik karena 97.08% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui kaderisasi. Sebagai tambahan, hubungan kedua variabel tersebut tetap positif dan sangat bermakna walaupun dikontrol melalui uji korelasi parsial.

Kedua, pengujian regresi sederhana untuk variabel komunikasi (X_2) dengan partisipasi politik (Y) memperoleh hasil: $\hat{Y} = 144.2134 + 0.0894 X_2$ dengan koefisien korelasi 0.9835. Hasil tersebut didukung oleh tingkat kepercayaan yang kemungkinan memunculkan kekeliruan dalam pendugaan yang relatif kecil, yaitu 5% ($\alpha = 0.05$). Oleh karena itu, komunikasi dapat memprediksi timbulnya partisipasi politik karena 96.73% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui komunikasi. Selain itu, hubungan kedua variabel tersebut tetap positif dan sangat bermakna walaupun dikontrol melalui uji korelasi parsial.

Ketiga, pengujian regresi berganda untuk variabel kaderisasi (X_1) dan komunikasi (X_2) dengan partisipasi politik (Y) memperoleh hasil: $\hat{Y} = 126.747 + 0.2411 X_1 + 0.0273 X_2$ dengan koefisien korelasi 0.9879. Hasil tersebut didukung oleh tingkat kepercayaan yang kemungkinan memunculkan kekeliruan dalam pendugaan yang relatif kecil, yaitu 1% ($\alpha = 0.01$). Oleh karena itu, secara bersama-sama kaderisasi dan komunikasi dapat memprediksi timbulnya partisipasi politik karena 97.59% varian yang terjadi pada partisipasi politik dapat dijelaskan melalui kaderisasi dan komunikasi. Di samping itu, hubungan ketiga variabel tersebut tetap positif dan sangat bermakna walaupun dikontrol melalui uji korelasi parsial.

Penelitian yang telah dilakukan ini tentu saja tidak lepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan yang tidak dapat dikontrol di antaranya sebagaimana terurai berikut ini. Pertama, di antara responden ada kemungkinan memilih alternatif jawaban yang menurut pendapatnya logis dan ideal dalam mengisi instrumen sehingga data yang diperoleh kurang dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, tidak ada kontrol terhadap variabel lain yang diperkirakan dapat lebih mempengaruhi partisipasi politik sehingga masih ada variabel lain yang lebih mempengaruhi partisipasi politik selain dari variabel

kaderisasi dan komunikasi. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan di satu lingkungan, yaitu para kader inti PKS sehingga generalisasinya terbatas pada populasi penelitian yang karakteristiknya hampir sama (homogen).

Simpulan

Pertama, semakin baik pelaksanaan kaderisasi di kalangan para kader PKS di Kota Bekasi semakin baik pula partisipasi politiknya. Kader PKS Kota Bekasi yang sejak mengikuti perekrutan telah terlibat aktif dalam berbagai macam bentuk pembinaan kader terus ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi kader yang sanggup melakukan pemberdayaan kader. Kader yang siap melakukan pemberdayaan kader di PKS harus siap pula melakukan berbagai aktivitas di antaranya adalah pengembangan kreativitas dan inovasi, pendayagunaan intelektual, dan penugasan/pendelegasian kader. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila kader terbina (dalam hal ini kader inti) yang telah siap melakukan pemberdayaan kader memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap partisipasi politik, yaitu sebesar 97.08%.

Kedua, semakin efisien dan efektifnya komunikasi di kalangan para kader PKS di Kota Bekasi, semakin besar pula hasilnya dalam berpartisipasi politik. Kader inti PKS di Kota Bekasi yang dilihat dari latar belakang pendidikannya sebagian besar di atas SLTA (164 responden atau 82%) adalah para kader yang benar-benar melakukan berbagai kegiatan komunikasi, baik komunikasi ke atas, ke bawah, maupun mendatar. Untuk komunikasi ke atas, wujudnya bisa dilihat dalam hal menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban, mengingatkan atasan, menyampaikan pesan, mengkonsultasikan gagasan, dan memberitahu-kan adanya suatu peristiwa. Sebagai atasan/fungsionaris partai, para kader inti melakukan komunikasi ke bawah di antaranya diwujudkan dalam bentuk memberikan perintah/tugas, melimpahkan wewenang, menegur/mengingatkan bawahan, membimbing/ mengarahkan, memberi petunjuk, memberi komentar, menasihati dan atau menyarankan, memberi motivasi, dan menanyakan kesulitan yang dihadapi bawahan. Sedangkan sebagai sesama kader inti ditumbuhkan adanya komunikasi mendatar yang meliputi berbagai aktivitas di antaranya bersama-sama dalam merumuskan tujuan, berapat untuk menetapkan kebijakan, bermusyawarah dalam menyusun program, melakukan koordinasi, berdiskusi dalam membuat keputusan, mengkonsultasikan gagasan, mengajak bekerja sama, dan secara bersama-sama

membahas instruksi yang diturunkan baik oleh DPW maupun DPP. Dengan koefisien determinasi 0.9708 atau 96.73% menunjukkan bahwa partisipasi politik bisa terjadi karena adanya komunikasi administrasi yang efisien dan efektif.

Ketiga, semakin baik pola pembinaan kaderisasi yang disertai dengan semakin efisien dan efektifnya pelaksanaan komunikasi para kader inti PKS Kota Bekasi memberikan dampak positif terhadap terlaksananya program-program partisipasi politik. Hal itu dapat dibuktikan dengan keikutsertaan para kader dalam kampanye, seperti memberikan dana untuk kampanye, mengerahkan tenaga/energi untuk aktivitas berkampanye, menyediakan/meluangkan waktu untuk berperan serta dalam kampanye, menghadiri pertemuan/rapat umum, memasang berbagai atribut partai, dan melakukan *direct selling* dalam rangka memperkenalkan partainya. Para kader inti juga berpartisipasi dalam pemilu dengan cara memberikan suara ke partainya, mengikuti dan mencatat penghitungan suara, dan menjadi saksi baik di TPS maupun KPPS. Sementara itu di luar/setelah pemilu, para kader inti berpartisipasi dalam hal mengungkapkan opini politik, mengikuti peristiwa politik, berperan serta dalam kegiatan ormas/orpol, serta mengkritisi dan memberikan masukan terhadap aktivitas dan kebijakan partai. Kader yang terbina melalui kaderisasi yang baik dan komunikasi administrasi yang efisien dan efektif memberikan kontribusi yang besar terhadap partisipasi politik, yaitu sebesar 97.59%.

Daftar Pustaka

- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Almuzamil Yusuf. 2003. *Isu Besar Dakwah dalam Pemilu*. Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera.
- Arbi Sanit. 1985. *Swadaya Politik Masyarakat Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Arifin Rachman. 1998. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Bennis, Warren G., Kenneth D.Benne., Robert Chin. 1989. *Merencanakan Perubahan* (a.b. Wilhelmus W.Bakowatun). Jakarta: Intermedia.

- Dahl, Robert. 1985. *Analisis Politik Modern* (a.b. Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Damanik, Ali Said. 2002. *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Departemen Kaderisasi PKS. 2004. *Rencana Strategis Kaderisasi Tahap II (2004 – 2009) Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera.
- Dodd.,Ch. 1986. *Pembangunan Politik* (a.b. Ratnawati). Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Draper, Norman & Harry Smith. 1992. *Analisis Regresi Terapan* (a.b. Bambang Sumantri). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Easton, David. 1988. *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik* (a.b. Sahat Simamora). Jakarta: PTBina Aksara.
- Hadari Nawawi. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Hadari Nawawi dan Marti Hadari. 1994. *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husain Umar. 1998. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juwono Sudarsono (ed.). 1982. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* Jakarta: PT Gramedia.
- Kweit, Mary Grisez & Robert W.Kweit. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. (a.b. Ratnawati). Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koirudin. 2004. *Profil Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed.). 1993. *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo (ed). 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nasution, Zulkarimein. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik*. a.b. Tjun Surjaman. Bandung: Remadja Karya.
- Onong Uchjana Effendy. 1979. *Komunikasi dan Modernisasi*. Bandung: Penerbit Alumni.

- Riza Noer Arfani (ed.). 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1992. *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suhud Alynudin dkk. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera Menjawab Tudingan dan Fitnah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Saksi.
- Suparman I.A. 1995. *Statistik Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutarto. (1991). *Dasar-dasar Komunikasi Administrasi*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia (a.b. Nur Isman Subono, dkk.)*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Bidang PSDM PK Sejahtera. *Mobilitas Kader Da`wah*. Jakarta: DPP Partai Keadilan Sejahtera
- TIM LKIS. 1999. *Pendidikan Politik bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja)*. Yogyakarta: LkiS.
- Young, Oran G. 1984. *Sistem Ilmu Politik (a.b. Sahat Simamora)*. Jakarta: Bina Aksara.